



**ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA
WISATA PANUNDAAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

Annisa Lazuardina¹, Suhirman²

^{1,2}Magister Perencanaan Kepariwisata Sekolah Arsitektur, Perencanaan,
Pengembangan dan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat.

Email: [1alzrdina@gmail.com](mailto:alzrdina@gmail.com), [2eshm@bdg.centrin.net.id](mailto:eshm@bdg.centrin.net.id)

Abstrak

Desa Wisata Panundaan terletak di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Desa ini telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak 2011. Namun, pada perbaharuan SK Bupati tentang desa wisata di tahun 2022 lalu, Desa Wisata Panundaan berstatus di kategori berkembang. Selama 11 tahun keberadaannya, Desa Wisata Panundaan mengalami stagnasi dalam pengembangan wilayah wisatanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah saat ini untuk memajukan pariwisata menjadi prioritas, karena inisiatif dan inovasi dalam pengembangan desa wisata dianggap penting. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis pengembangan Desa Wisata Panundaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses penelitian ini, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Desa Wisata Panundaan. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaksinergisan *stakeholder* yang memiliki tingkatan kepentingan dan pengaruh tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis *stakeholder* untuk mengidentifikasi serta memetakan berbagai aktor yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh. Tujuan akhir dari analisis *stakeholder* ini adalah merekomendasikan peran-peran *stakeholder* yang seharusnya berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata Panundaan, serta menggambarkan alur koordinasi antar *stakeholder* yang seharusnya terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Panundaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif secara kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara (in-depth interview) dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode analisis *stakeholder*.

Kata Kunci : Desa Wisata, Analisis Stakeholder, Peran Stakeholder

PENDAHULUAN

Konsep pariwisata di wilayah perdesaan dapat memicu percepatan pembangunan masyarakat dan perekonomian. Desa wisata menawarkan alternatif destinasi wisata yang unik dengan ciri khas daerah masing-masing. Pada tahun 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menyelenggarakan program kompetisi ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) yang diikuti oleh 3.000 desa. Pertumbuhan desa wisata di Indonesia diyakini dapat membantu kebangkitan perekonomian, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga S. Uno, dalam Kegiatan Sosialisasi

Sadar Wisata secara daring. Beliau meyakini bahwa perkembangan desa wisata akan meningkatkan penghasilan masyarakat, baik dalam lapangan pekerjaan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia (sumber: suara.com, April 2022).

Penggerak sektor pariwisata tidak lepas dari peran pengelola dan pihak-pihak terlibat dalam pengembangan sektor tersebut. Pengelolaan yang baik dan tepat memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan pariwisata yang



terencana dan melibatkan semua *stakeholder* sangat penting untuk mencapai manfaat optimal dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang memiliki rencana untuk mengembangkan destinasi wisata menjadi kelas dunia. Di Kabupaten Bandung, pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas, termasuk dalam penetapan 50 desa wisata yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan SK Bupati No.556/kep.770-DISBUDPAR/2022 pada bulan Desember 2022.

Desa Wisata Panundaan terletak di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Desa ini berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Kabupaten Bandung, yaitu Soreang, yang menjadi gerbang masuk bagi wisatawan melalui Tol Seroja (Soreang – Pasir Koja). Aksesibilitas yang mudah menjadikan desa ini dapat dengan mudah dijangkau dari ibu kota negara DKI Jakarta dan ibu kota Jawa Barat, Kota Bandung. Pada klasifikasi pengembangan desa wisata tahun 2011, Desa Wisata Panundaan termasuk desa wisata yang berkembang. Desa ini sudah dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah. Sarana, prasarana, dan fasilitas pariwisata telah dikembangkan, dan lapangan pekerjaan telah tercipta. Namun, hal ini belum cukup karena tujuan pengembangan desa wisata adalah mencapai kemandirian hingga standar internasional, atau setidaknya standar ASEAN.

Pemerintah memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata serta bertanggung jawab dalam menentukan arah dan tujuan pariwisata. Kebijakan makro yang diambil oleh pemerintah menjadi panduan bagi *stakeholder* lain dalam memainkan peran masing-masing. Sinergi antara *stakeholder* diperlukan dalam kolaborasi pengelolaan destinasi. Dalam upaya pengembangan Desa Wisata Panundaan, semua pihak yang terlibat harus dilibatkan, bukan

hanya sebagian saja. Saat ini, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan desa wisata ini, seperti keberadaan manajemen inti yang belum jelas dan keterlibatan *stakeholder* lain dalam pengembangan yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap tingkat kepentingan dan pengaruh yang seharusnya terjadi di Desa Wisata Panundaan serta untuk mengoptimalkan peran masing-masing *stakeholder*.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Panundaan dari sisi kepentingan dan pengaruh *stakeholder* yang berada di desa tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa adanya mengenai variabel, keadaan, atau fenomena sosial tertentu. Menurut Nazir (2005), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, dan lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Desa Wisata Panundaan hadir sebagai hasil dari upaya pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di desa untuk mendukung pengembangan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Dalam upaya pemanfaatan tersebut, beberapa aktor terlibat dalam mendukung dan mendorong satu sama lain untuk mengembangkan Desa Wisata Panundaan. Berikut adalah aktor-aktor yang terlibat dalam upaya tersebut:

Tabel 1 Aktor-aktor yang Terlibat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Panundaan

No	Stakeholder	Tingkat n / Level	Inisial



1	Praktisi: Orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu dan bekerja di lapangan.	Institusi Pendidikan (N)	IT
2	Akademisi: Orang yang bekerja atau berprofesi di bidang akademik atau pendidikan tinggi.	Institusi Pendidikan (N)	HD
3	HPI: Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kabupaten Bandung	Organisasi Kabupaten	ATJ
4	Dinas Pariwisata: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	Pemerintah Kabupaten	DA
5	BPD: Badan Permusyawaratan Desa Panundaan	Lembaga Legislatif Desa	ATJ
6	Perangkat Desa: Sekretaris Desa dan Kepala Dusun	Pemerintah Desa	HI
7	Pokdarwis: Ketua Kelompok Sadar Wisata	Masyarakat Desa	IY
8	Pemilik <i>Homestay</i> : Orang yang memiliki usaha penyediaan akomodasi sementara (seperti penginapan) bagi wisatawan di rumah atau tempat tinggal pribadinya	RT/RW	IY
9	Pemandu Lokal: Orang yang mengarahkan dan memandu wisatawan dalam suatu perjalanan wisata di suatu daerah.	Masyarakat Desa	GL
10	BumDes: Badan Usaha Milik Desa Panundaan	Lembaga Naungan Pemerintah Desa	AL

Hasil Analisis, 2023

Metode Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata. Pengukuran ini dilakukan secara kualitatif dengan menilai tingkat kepentingan dan pengaruh sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan adil dengan menggunakan pengetahuan, informasi, perkiraan, atau perasaan, serta membandingkannya dengan keadaan *stakeholder* lain. Tingkat kepentingan dinilai tinggi jika kerugian atau kesulitan yang dialami *stakeholder* jika kepentingannya tidak terpenuhi adalah besar, rendah jika kerugian yang dialami kecil, dan sedang jika berada di

tengah-tengah. Tingkat pengaruh dinilai tinggi jika *stakeholder* memiliki kekuatan yang lebih besar daripada *stakeholder* lain, rendah jika kekuatan totalnya lebih kecil, dan sedang jika berada di tengah-tengah.

Dalam proses identifikasi kekuatan (pengaruh) dan kepentingan *stakeholder* terhadap Desa Wisata Panundaan, penilaian dilakukan dengan mengubah nilai kualitatif (tinggi, sedang, rendah) menjadi angka atau skor, di mana tinggi diubah menjadi 5, sedangkan rendah menjadi 1. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan antara lain:

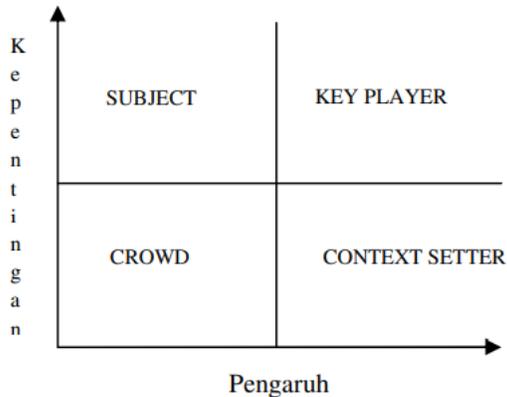
- Penilaian terhadap kekuasaan, tingkatan, dan status masing-masing *stakeholder*.
- Penilaian terhadap kekuatan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*.
- Penilaian terhadap pengaruh informal (koneksi personal) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*.
- Penilaian terhadap hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*.
- Penilaian terhadap pentingnya keterlibatan masing-masing *stakeholder* dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Panundaan.

Penyusunan matriks kepentingan dan pengaruh dilakukan berdasarkan deskripsi pernyataan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (score) dan dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan. Nilai score dari pernyataan dijumlahkan dan nilainya dipetakan dalam bentuk matriks. Posisi kuadran dapat menggambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing *stakeholder* terkait dengan pengembangan Desa Wisata Panundaan yaitu:

- Subject* (kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah);
- Keyplayer* (kepentingan dan pengaruh tinggi);



3. *Context setter* (kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi) dan
4. *Crowd* (kepentingan dan pengaruh rendah).



Gambar 1 Matriks Kepentingan – Pengaruh

Sumber: Reed et.al 2009

Kriteria penilaian tingkat pengaruh *stakeholder* ini memiliki aspek dan unsur yang bisa diberikan penilaian atau scoring untuk mendapatkan posisi *stakeholder* mana saja yang paling berpengaruh dan berkepentingan. Pembuatan posisi kuadran yang didasarkan pada analisis *stakeholder* dapat dibuat menggunakan software SPSS. Data dari survei mengenai kepentingan dan kinerja variabel-variabel yang dianalisis dapat diolah dan dianalisis dengan lebih efisien dan akurat. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghasilkan grafik posisi kuadran yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, hasil daripada identifikasi hubungan antara *stakeholder* ini akan di deskripsikan dan untuk memperkuat posisi dan penilaian scoring kepentingan dan pengaruh.

Penjelasan Konsep

Menurut Thompson dalam Kadir (2014), peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan atau program dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh aktor tersebut. Bryson (2004) dan Reed et al. (2009) menjelaskan bahwa untuk mengklasifikasikan atau mengategorikan *stakeholder*, dapat menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh dengan

membedakan *stakeholder* ke dalam beberapa kategori berikut:

Subyek (*Subject*): Aktor dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Meskipun memiliki kapasitas yang rendah dalam mencapai tujuan, aktor ini memiliki potensi untuk mempengaruhi melalui membentuk aliansi dengan aktor lain. Hubungan dengan aktor ini perlu dijaga dengan baik karena mereka dapat memberikan bantuan yang signifikan.

Pemain Kunci (*Keyplayer*): Aktor dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Aktor ini harus secara aktif terlibat dalam seluruh proses, termasuk dalam evaluasi strategi baru.

Pengikut Lain (*Crowd*): Aktor dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Aktor ini perlu dilibatkan lebih lanjut karena kepentingan dan pengaruh mereka dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, perlu menjaga komunikasi dan pengawasan yang baik terhadap aktor ini.

Pendukung (*Context setter*): Aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi. Aktor ini berpotensi membawa risiko, oleh karena itu, keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini juga dapat berubah menjadi pemain kunci karena adanya peristiwa tertentu, oleh karena itu, hubungan baik dengan *stakeholder* ini harus terus dipertahankan. Informasi yang diperlukan perlu terus diberikan kepada aktor ini agar mereka tetap berperan aktif dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, penggunaan matriks kepentingan dan pengaruh dalam mengklasifikasikan *stakeholder* akan membantu dalam memahami peran dan interaksi mereka dalam pengembangan Desa Wisata Panundaa.

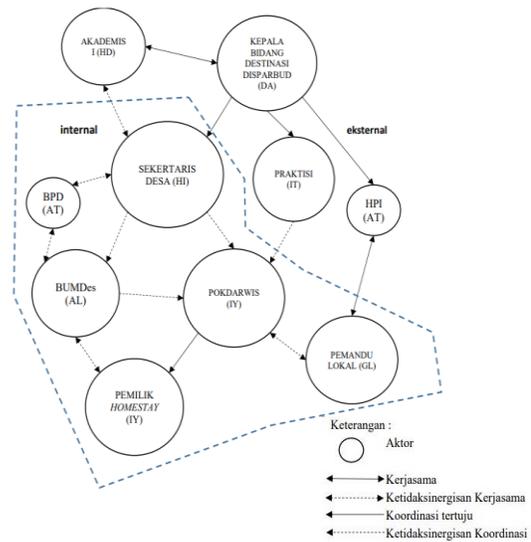
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, dilakukan kerjasama antara dinas, akademisi, dan praktisi untuk pengembangan destinasi pariwisata di

Kabupaten Bandung. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang melibatkan 50 desa wisata, mulai dari desa rintisan hingga desa wisata mandiri. Program ini hasil dari forum diskusi yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata, melibatkan pelaku desa wisata, akademisi, dan dinas pariwisata. Dalam diskusi tersebut, institusi pendidikan seperti UPI, Poltekpar NHI Bandung, STIEPAR Yapari AKTRIPA, UNPAD, dan POLBAN juga terlibat. Tujuan diskusi ini adalah pemahaman tentang keberlanjutan desa wisata. Dalam tahapan pengembangan desa wisata, Disparbud Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendampingi dan memfasilitasi desa-desa wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung serta HPI DPC Kabupaten Bandung juga terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Panundaan di tingkat kabupaten. Perangkat desa, seperti BPD dan BUMDes, memiliki peran dalam mengelola anggaran desa wisata. Desa Wisata Panundaan mengalami stagnasi dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama setelah dampak pandemi COVID-19. Namun, Desa Wisata Panundaan tetap berusaha mengembangkan potensi wisata secara mandiri. *Stakeholder* di tingkat RT/RW dan masyarakat desa juga berperan dalam pengelolaan dan promosi Desa Wisata Panundaan.

Hubungan Antar Stakeholder

Dari hasil masing-masing wawancara *stakeholder*, mereka itu berkaitan satu sama lain. Dalam rangka penata kelolaan Desa Wisata Panundaan, seluruh *stakeholder* terkait harus bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan SK yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran hubungan antar *stakeholder*:



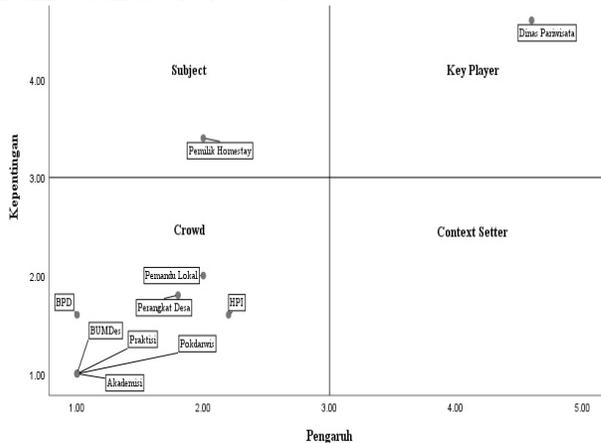
Gambar 2 Hubungan Antar Stakeholder Keadaan Aktual Hasil Analisis, 2023

Gambar 2 membagi *stakeholder* menjadi internal dan eksternal. Proses wawancara dilakukan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan Desa Wisata Panundaan, dengan fokus pada *stakeholder* internal, khususnya Pokdarwis. Pokdarwis memiliki peran penting sebagai aktor kunci dalam pengembangan Desa Wisata Panundaan di tiga RW: RW 7 Kampung Tonjong, RW 8 Kampung Hulowotan, dan RW 9 Cianggawana. Disparbud Kab. Bandung, melalui Akademisi, Praktisi, Perangkat Desa, dan BUMDes, memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, terdapat ketidaksinergisan dalam kerjasama dan koordinasi antara perangkat desa dengan Pokdarwis, BPD, dan BUMDes, serta Praktisi dengan Pokdarwis, Pemandu Lokal dengan Pokdarwis, BUMDes dengan Pemilik Homestay, dan Akademisi dengan Perangkat Desa. Masalah internal di perangkat desa dan Pokdarwis, seperti tidak adanya Surat Keputusan (SK) penentuan Pokdarwis sejak pandemi dimulai pada tahun 2020, menjadi penyebabnya. Selain itu, tidak ada sinergi antara BUMDes dengan perangkat desa dalam mengontrol promosi digital untuk homestay.



Evaluasi tata kelola perlu dilakukan antara Pokdarwis dan pemandu lokal agar pengelolaan organisasi dapat berkolaborasi dengan baik di Desa Wisata Panundaan terkait pariwisata. Meskipun praktisi telah menentukan proses pendampingan pada tahun 2022, hingga Februari 2023, belum ada kerjasama pendampingan bagi Desa Wisata Panundaan, yang menyebabkan kurangnya sinergi di antara mereka.

Pemetaan Stakeholder



Gambar 3 Pemetaan Stakeholder Di Desa Wisata Panundaan Hasil Analisis SPSS, 2023

Gambar 3 membagi *stakeholder* menjadi empat kelompok: *keyplayer*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. *Keyplayer* adalah *stakeholder* dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, seperti Disarbud Kabupaten Bandung. *Subject* adalah *stakeholder* dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya relatif rendah, seperti pemilik homestay. *Context setter* adalah *stakeholder* dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingannya relatif sedikit dan belum teridentifikasi. *Crowd* adalah kelompok *stakeholder* yang berperan sebagai pengamat dan pengobservasi, seperti BPD, BUMDes, perangkat desa, pemandu lokal, dan Pokdarwis. *Stakeholder* internal saat ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang kecil karena beberapa faktor, seperti ketidaksempurnaan struktur organisasi dan ketidakhadiran wisatawan. *Stakeholder* eksternal terdiri dari

akademisi, praktisi, dan HPI, yang telah bersedia mendampingi dan membimbing dalam konsep pengembangan Desa Wisata Panundaan, tetapi pengelolaan dari *stakeholder* internal belum maksimal.

KESIMPULAN

Dalam pengembangan Desa Wisata Panundaan menuju tingkat maju, identifikasi *stakeholder* penting untuk memastikan keberhasilan visi bersama. Terdapat 10 *stakeholder* teridentifikasi dengan pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Desa Wisata Panundaan. Dalam pemetaan *stakeholder*, terdapat *keyplayer* eksternal seperti Disarbud Kab. Bandung dan aktor internal seperti Pemilik Homestay. Hubungan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* teridentifikasi, namun perlu diperkuat.

SARAN

Rekomendasi untuk *stakeholder* internal dan eksternal yang terlibat dalam Desa Wisata Panundaan maju sebaiknya ditambahkan peran aktornya dengan idealisme konsep menurut (Talib, 2021) yang akan dijabarkan beserta perannya sebagai berikut:

- Pemerintah**
Pemerintah perlu berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata Panundaan dengan mengkoordinasikan program kerja desa wisata dan memberikan subsidi atau sumber daya yang diperlukan. Kerjasama dengan Disarbud Kabupaten Bandung dan Perangkat Desa sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung visi kemajuan desa wisata.
- Komunitas Lokal**
Komunitas lokal seperti kelompok petani dan kelompok masyarakat seperti Ibu-ibu PKK, Bapak-bapak RW, dan Pemuda/Karang Taruna dapat dijadikan sebagai kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam mengembangkan pariwisata di Desa Wisata

Panundaan. Partisipasi komunitas lokal akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pelaksanaan rencana aksi dan mencapai tujuan bersama.

c. Investor

Pihak swasta atau investor dapat diajak bekerjasama dalam penyediaan amenities dan fasilitas yang mendukung aktivitas wisata di Desa Wisata Panundaan. Kerjasama dengan investor dapat dilakukan melalui pengajuan proposal dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

d. Akademisi

Akademisi dapat memberikan ide, inovasi, dan bimbingan kepada warga desa yang tertarik di sektor wisata. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pelaku wisata di desa dapat memperkaya pengetahuan dan mencari solusi terbaik untuk pengembangan desa wisata. Praktisi juga dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan rencana aksi..

e. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

SM dapat bekerja sama dengan Desa Wisata Panundaan dalam memberikan dukungan berupa kapasitas, pelatihan, dan pengembangan jaringan. Kolaborasi dengan LSM dapat memperluas jangkauan informasi, mendapatkan bantuan ahli, dan mencari solusi terkait pengembangan masyarakat, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

f. Media

Media memiliki peran penting dalam meningkatkan eksistensi Desa Wisata Panundaan. Dengan bekerja sama dengan media, seperti meliput berita atau memanfaatkan platform digital, informasi tentang desa wisata dapat lebih luas dijangkau oleh wisatawan potensial. Penggunaan strategi digital marketing juga dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan mempromosikan produk wisata.

g. Wisatawan

Wisatawan memiliki peran dalam mengevaluasi produk wisata yang disediakan oleh Desa Wisata Panundaan. Melalui survei

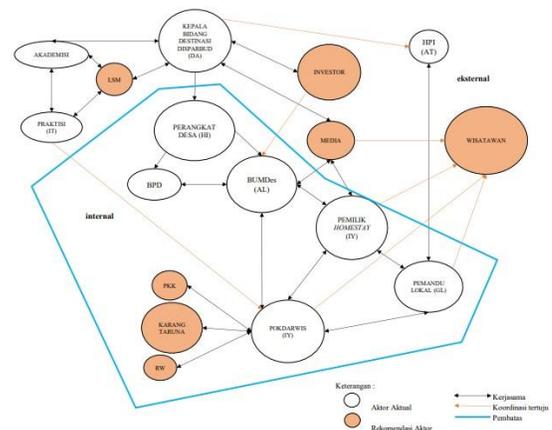
kepuasan wisatawan, desa dapat meningkatkan kualitas produk wisata dan pelayanan yang disediakan. Menyediakan kebutuhan dasar wisatawan dengan baik juga penting untuk meningkatkan kepuasan mereka.

h. BUMDes

BUMDes dapat berperan dalam mengkoordinasikan program-program rencana aksi dengan melibatkan sektor wisata. Pengesahan struktur organisasi yang terstruktur dan alokasi anggaran untuk sektor wisata akan mendukung kemajuan Desa Wisata Panundaan. Kerjasama dengan pihak lain juga dapat membantu dalam implementasi program-program rencana aksi.

Rekomendasi Hubungan Antar Stakeholder

Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program-program yang telah disepakati bersama dalam rangka memperbaiki program-program tersebut agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Pada bab analisis hubungan antar *stakeholder* telah teridentifikasi banyak hubungan yang tidak terjalin, baik kerjasama maupun koordinasinya. Berikut merupakan rekomendasi hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan Desa Wisata Panundaan maju:



Gambar 4 Rekomendasi Hubungan Antar Stakeholder
Hasil Analisis, 2023



Rekomendasi Kuadran *Stakeholder*:

Kuadran *Keyplayer* Internal: Lakukan FGD untuk diskusikan tugas, visi, misi, dan tupoksi *stakeholder* internal seperti Pokdarwis, BUMDes, perangkat desa, dan pemilik homestay. Susun secara formal oleh BUMDes dan diresmikan oleh perangkat desa. Dengan sinergi yang baik, Desa Wisata Panundaan dapat maju sebagai destinasi wisata menarik.

Kuadran *Keyplayer* Eksternal: Bentuk kolaborasi antara Disparbud, Praktisi, Akademisi, dan HPI DPC Kab. Bandung dengan Pokdarwis, BUMDes, perangkat desa, dan pemilik homestay. Dukungan dalam promosi, informasi, dan bimbingan teknis akan membantu pengembangan desa wisata.

Peran Aktor Internal: Sosialisasikan manfaat dan potensi ekonomi homestay, berikan dukungan keuangan melalui BUMDes, promosikan melalui media sosial, dan libatkan lebih banyak warga desa untuk meningkatkan pengalaman wisata dan ekonomi lokal.

Peran Aktor Eksternal: Sosialisasikan pentingnya peran mereka, koordinasi dan kolaborasi antar aktor internal, evaluasi kinerja secara rutin, dan tingkatkan kapasitas melalui pelatihan.

Kuadran *Context setter*: Undang partisipasi *stakeholder* yang belum teridentifikasi, perhatikan keberlanjutan dalam pengelolaan desa wisata, rencanakan kegiatan berkelanjutan, dan lakukan pemasaran dan promosi yang baik melalui media sosial, situs web, dan acara promosi. Diharapkan pengembangan Desa Wisata Panundaan menjadi lebih optimal dan berdampak positif pada masyarakat setempat, wisatawan, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aas, C., Ladkin, A., dan Fletcher, J. 2005. *Stakeholder Collaboration and Heritage Management*. (Annals of Tourism Research 32 (1). 28-48)

- [2] Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten. 24(3), 173–188.
- [3] Dian, Y. K., Kartikawati, S. M., & Widiastuti, T. (2022). Analisis *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Baning Sintang Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropic*, 1(April), 440–454.
- [4] Eagles PFJ, Romagosa F, Havitz WCBD, Glover TD, McCutcheon B. 2013. Good governance in protected areas: an evaluation of *Stakeholder* perceptions in British Columbia and Ontario Provincial Parks. *J of Sustainable Tourism*.21(1): 60-79.
- [5] Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada Glaser, Barney G, dan Anselm L. Strauss. 1967. Penemuan grounded theory: strategi untuk penelitian kualitatif. Chicago: Aldine Pub. Bersama.
- [6] Febriana, Annisa. 2017. Perencanaan Produk Agrowisata Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Andung. Proyek Akhir. Politeknik Pariwisata NHI Bandung
- [7] Freeman, R.E. (1984). *Strategic management: A Stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing Inc
- [8] Kamal, Mustofa. 2018. STRATEGI Pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang Di Kabupaten Bandung Dengan Menggunakan Analisis *Stakeholder*. Tesis Magister Kepariwisata. Institut Teknologi Bandung
- [9] Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who's and why? A Typology of *Stakeholder* Analysis Methods for Natural Resource



- Management. J of Environmental Management, 90: 1933-1949.
- [10] Talib, D. (2021). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.31314/tulip.3.1.12-18.2020>
- [11] Widiyanti, H. (2016). Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata Di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur.
- [12] Widyanti, Ni Nyoman. 2022. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 Targetkan 3.000 Desa Wisata. <https://travel.kompas.com/read/2022/02/19/090300727/anugerah-desawisata-indonesia-2022-targetkan-3.000-desawisata>. Diakses pada 12 Mei 2022.
- [13] Sumarna, Ayi. 2011. 10 Desa Kabupaten Bandung Layak Jadi Desa Wisata. <https://ciburial.desa.id/10-desadi-kabupaten-bandung-layak-jadi-desawisata/>. Diakses pada 12 Mei 2022
- [14] Diskominfo, 2023. Demografi Berdasar Jenis Kelamin. <https://panundaan.desa.id/first/statistik/4>
- [15] Traveloka. 2019. Eco Tourism Desa Panundaan Ciwidey. <https://www.traveloka.com/id-id/hotel/indonesia/oyo-homes-90992-eco-tourism-desapanundaan-ciwidey-9000000984946>
- [16] Media berita suara. 2022. Kumpulan berita ADWI KEMENPAREKRAF. <https://www.suara.com/tag/adwi-2022>
- [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025
- [18] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025
- [19] Keputusan Bupati Bandung Tentang Penetapan Desa Wisata Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022
- [20] Pusat Bahasa. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi). Edisi Kelima. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN